

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten di Povinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengupayakan peningkatan pendapatan daerah masih sangat bergantung dari penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sehingga PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah.
2. Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti bahwa kebutuhan masyarakat dimana pemerintah daerah masih lebih banyak mengalokasikan sumber pendapatannya untuk belanja modal sehingga pengalokasian belanja modal terealisasi secara maksimal. Kondisi ini berarti dalam merealisasikan PAD pemerintah daerah mampu memobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal.

3. Rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti bahwa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat mengandalkan sumber pendapatan transfer pemerintah pusat/provinsi untuk membiayai belanja daerahnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak terdapat data revisi anggaran Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dari periode tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke periode lain.
3. Model yang digunakan dalam penelitian tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan kompleks antara kinerja keuangan dan alokasi belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R Square sebesar 11,9 %. Artinya bahwa variabel Alokasi belanja modal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan keuangan daerah (x) sebesar 11,9 % sedangkan sisanya 88,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian ini.

- 4 Faktor politik dan ekonomi yang tidak terukur dapat memengaruhi alokasi belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak sepenuhnya mencerminkan pengaruh kinerja keuangan.
- 5 Karakteristik daerah, seperti tingkat kemiskinan dan infrastruktur, dapat memengaruhi alokasi belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain.
- 6 Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke semua pemerintah kabupaten di NTT atau ke periode waktu lain.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal bagi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan model yang lebih kompleks untuk menggambarkan hubungan antara kinerja keuangan dan alokasi belanja modal.
2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh faktor eksternal, seperti faktor politik dan ekonomi, terhadap alokasi belanja modal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menggali potensi – potensi yang dimiliki daerah diantaranya pengembangan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan dan kelautan serta industri dan perdagangan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak termasuk pajak daerah yang menghasilkan objek pajak baru.

Dengan demikian, pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan lebih mengoptimalkan lagi belanja modal yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat diantaranya pembangunan infrastruktur, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang dapat mempercepat pembangunan daerah dan secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Peneliti Selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk menggunakan lebih banyak rasio kinerja keuangan yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio tingkat pembiayaan SiLPA serta rasio derajat kontribusi BUMD.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi Volume*, 9(2), 21–36.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Fajriati, C. E., & Anwar, H. S. (2022). *I.+Cindy*. 8, 436–451.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penelitian Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryono, Siswoyo. 2020. *Statistika Penelitian Bisnis & Manajemen*. Yogyakarta : LP3M UMY
- <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>

Halim. (2013). *No Title*.

Hanifiyah, N. &. (2015). *No Title*.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://www.bpk.go.id/>

Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.

<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04>

Marlianita, Yulistiani dan Suji Abdullah Saleh. 2020. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal* .Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pustaka Amaida.

Marlina, Lilis, Mirna Indriani dan Heru Fahlevi. 2017. Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* .Volume 6 Nomor 1 Februari 2017.

Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 10 Nomor 2.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nalsasl, Pindonta dan Nurul Janah Umiyati Hanifiyah. 2015. Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Banten. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis Pengaruh*. Volume 3 Nomor 1.

No 12, P. P. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

No 23, U.-U. (2014). *Pemerintahan Daerah*.

No 77, P. (2020). *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Nomor 58. (2005). *Peraturan Pemerintah*.

Oktavianti, Y. A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.

Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.

Paramita, Ratna Wijayanti Daniar, dkk. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif : Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen Edisi Ketiga*. Lumajang : Widya Gama Press.

Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(2), 256–268.
<http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>

Patarai, Muhammad Idris. 2018. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makasar : De La Macca.

Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta. *Among Makarti*. Volume 7 Nomor 13 Juli 2014.

Satria, M. R. (2020, Juli). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT Batan Bandung. *Land Journal*. Yulientinah, D. S., & Nur, A. M. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dibadan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten/Kota Bulukumba. *Land Journal*, 2(2), 15–29.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1344>

Surastowo. 2019. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timuri. *Jurnal SIMPLEX*. Volume 2 Nomor 3 Desember 2019.

Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : ALFABETA,cv.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Volume 1 Nomor 2 Agustus 2011.

Sujarweni. (2019). *No Title*.

Sularso. (2011). *No Title*.

Waoma, Samaluna. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan. *OWNER – Riset & Jurnal Akuntansi*. Volume 2 Nomor 2 Februari 2018.

Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3), 346–357. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484>

Yulientinah, D. S., & Nur, A. M. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dibadan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten/Kota Bulukumba. *Land Journal*, 2(2), 15–29. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1344>

Zelmiyanti, Riri. 2016. Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK*. Volume 7 Nomor 1 Februari 2016. Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja

Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal*

Akuntansi & Keuangan Unja, 5(2), 132–144.

<https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>